ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik dan Implikasinya terhadap Strategi Keamanan Maritim Indonesia

Dhany Tantowi Tinambunan[1], Nefra Firdaus[2], Yuniar[3], Harri Dolli Hutabarat[4]
[1,2,3,4]Universitas Pertahanan Republik Indonesia
E-mail: dhany.tinambunan@km.idu.ac.id[1] , nefra.firdaus@idu.ac.id[2] , yuniar@idu.ac.id[3] , harri.dolli@idu.ac.id[4]

Article History:
Received: 24 Oktober 2026
Revised: 26 Oktober2026
Accepted: 03 November 2026

Keywords: *Geopolitik Indo-Pasifik, Keamanan Maritim, Strategi Indonesia, Analisis SWOT, Otonomi Strategis, ASEAN.*

Abstrak: *Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok serta berkembangnya sejumlah visi Indo-Pasifik mengubah lingkungan strategis tempat Indonesia merumuskan keamanan maritimnya. Artikel ini menganalisis bagaimana dinamika geopolitik tersebut memengaruhi strategi keamanan maritim Indonesia dan merumuskan pilihan strateginya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi literatur dan data sekunder, dengan analisis isi tematik dan analisis SWOT yang setiap faktornya ditelusuri ke sumber yang dapat diverifikasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa letak strategis, modal diplomatik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan prinsip bebas-aktif menjadi kekuatan utama, sedangkan lambatnya modernisasi pertahanan, komunikasi strategis yang tidak konsisten, dan eksekusi kebijakan yang tidak merata menjadi kelemahan utama. Peluang terutama berasal dari kerja sama pertahanan dan kapasitas bersama banyak mitra, sedangkan ancaman berasal dari rivalitas kekuatan besar, kohesi ASEAN yang terbatas, dan dilema nonblok. Strategi yang paling beralasan adalah mengoperasionalkan gagasan ASEAN melalui kerja sama konkret, memperkuat pengawasan maritim secara bertahap melalui kemitraan beragam, dan menjaga otonomi strategis berbasis hukum laut. Kesimpulan ini bersandar pada data sekunder dan perlu diuji dengan data primer.*

PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik kini menjadi kerangka utama dalam pembicaraan tentang keamanan dan ekonomi Asia. Istilah ini bukan sekadar label geografis. (He, 2018) mencatat bahwa sebagian besar kajian menelaah bagaimana Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, dan Indonesia mempromosikan konsep tersebut serta bagaimana Tiongkok menolak dimensi keamanan maritimnya, sedangkan persepsi Tiongkok yang lebih luas tentang kawasan kurang mendapat perhatian. (Singh, 2019) menempatkan perdebatan yang sama dari sudut pandang India dan menyoroti letak Tiongkok di dalamnya. Dua telaah ini menunjukkan bahwa Indo-Pasifik adalah arena kontestasi gagasan dan kepentingan, bukan ruang netral.

Bagi Indonesia, kontestasi itu berdampak langsung. (Anwar, 2020) menjelaskan bahwa Indonesia mendorong ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang diadopsi pada KTT ASEAN di Bangkok pada Juni 2019, antara lain untuk menjaga sentralitas ASEAN ketika rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok dan visi Indo-Pasifik yang bersaing berisiko meminggirkan ASEAN. Anwar juga mengaitkan gagasan itu dengan visi Poros Maritim Dunia dan letak Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. (Saputra, Somantri, & Subroto, 2025) menegaskan bahwa pengaruh maritim Indonesia sangat menentukan stabilitas keamanan Asia Tenggara, terutama di Selat Malaka. Kebijakan dalam negeri mengikuti arah yang sama. Perpres No. 16 Tahun 2017 menetapkan Kebijakan Kelautan Indonesia beserta rencana aksinya, dan (Febrica, 2023) serta (Farhana, 2022) menelaah upaya Indonesia menjadi poros maritim kawasan.

Persoalannya, posisi strategis tidak otomatis menghasilkan strategi keamanan maritim yang efektif. (Saputra dkk., 2025) menemukan bahwa daya tangkal Indonesia dibatasi oleh lambatnya modernisasi pertahanan, komunikasi strategis yang tidak konsisten, dan pelaksanaan kebijakan yang tidak merata, ditambah keterbatasan anggaran dan diplomasi ASEAN yang berbasis konsensus. (Koga & Lim, 2026) menilai Poros Maritim Dunia tidak menghasilkan sentralitas jaringan yang bertahan lama, sehingga Indonesia beralih memperkuat sentralitas ASEAN, yang menurut mereka baru sebagian terinstitusionalisasi. (Darmawan, Sumadinata, & Darmawan, 2025) menunjukkan sisi lain: perjanjian kerja sama pertahanan dengan Australia pada Agustus 2024 memperdalam interoperabilitas dan kerja sama keamanan maritim, tetapi mempersulit penjagaan nonblok di tengah hubungan dengan Tiongkok dan keterlibatan dengan AUKUS.

Penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam lima arus yang saling berbeda dalam penilaian. Arus diplomatik-normatif menilai peran Indonesia dalam AOIP. (B. A. Putra & Cangara, 2024) menyimpulkan bahwa norma yang diusung Indonesia telah terinternalisasi oleh negara anggota ASEAN dan pihak kunci lainnya, sedangkan (Anwar, 2020) mencatat keraguan atas kemampuan ASEAN menggerakkan proses ini dan perlunya rencana aksi yang konkret, dan (Koga & Lim, 2026) menilai sentralitas berbasis ASEAN baru sebagian terinstitusionalisasi. Arus strategi besar dan *hedging* membaca perilaku Indonesia sebagai kombinasi ambisi dan kendala domestik (Shekhar, 2018), sebagai strategi negara pivot dalam menanggapi Inisiatif Sabuk dan Jalan dan Indo-Pasifik (Yoshimatsu, 2022), serta sebagai hasil politik domestik dan penyeimbangan terhadap Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang (Febrica, 2023), sedangkan (Scott, 2019) menelaah upaya penjangkauan, wacana strategis, dan diplomasi Indonesia terkait Indo-Pasifik. Arus pertahanan dan hukum menelaah daya tangkal dan kerja sama bilateral (Darmawan dkk., 2025). Arus evaluasi Poros Maritim Dunia diwakili (Fitrah, Darmawan, & Luthfi, 2025), yang menelusuri evolusi strategi itu pada 2014-2024 dan menyimpulkan bahwa efektivitasnya dibatasi oleh rivalitas kekuatan besar dan keterbatasan internal, serta bahwa keberlanjutannya bergantung pada pelembagaan di bawah kepemimpinan berikutnya. Arus pemodelan strategi diwakili (I. N. Putra, Sudiarso, Khaerudin, & Susilo, 2023), yang menggabungkan analisis faktor internal dan eksternal, QSPM, dan AHP, lalu menempatkan strategi maritim nasional pada Kuadran I dengan strategi SO sebagai jalur utama. Penilaian itu bersifat kuantitatif dan berbasis skor, dan cakupan waktunya mendahului sebagian besar literatur 2025–2026 yang justru menekankan kendala pelaksanaan.

Dari telaah tersebut tampak kesenjangan dalam korpus literatur yang ditelaah artikel ini. Setiap arus menjelaskan satu dimensi, yaitu diplomasi, strategi besar, pertahanan, atau pemodelan, dan perbedaan penilaian antar-arus (misalnya antara internalisasi norma dan institusionalisasi parsial) belum dipertemukan dalam satu kerangka yang menghubungkan perubahan lingkungan strategis dengan pilihan strategi keamanan maritim. Selain itu, faktor yang dipakai dalam penelitian berbasis skor belum selalu dapat ditelusuri satu per satu ke sumber terbuka. Artikel ini mencoba

mengisi kesenjangan tersebut dengan sintesis kualitatif, yaitu tabel faktor SWOT yang setiap butirnya ditautkan ke sumber, matriks SWOT, dan rumusan strategi yang diturunkan dari keduanya. Kontribusinya bersifat sintesis dan terbatas pada data sekunder. Artikel ini tidak mengklaim temuan empiris baru.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian adalah: (1) bagaimana dinamika geopolitik Indo-Pasifik berkembang dan apa implikasinya bagi Asia Tenggara dan Indonesia; (2) faktor internal dan eksternal apa yang membentuk ruang gerak strategi keamanan maritim Indonesia; dan (3) strategi apa, berdasarkan matriks SWOT, yang paling beralasan untuk dipilih. Tujuan penelitian ialah menjawab ketiga pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur yang dapat ditelusuri.

LANDASAN TEORI

Geopolitik Indo-Pasifik

Geopolitik Indo-Pasifik dipahami di sini sebagai kontestasi kekuatan di ruang maritim yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, yang diwarnai oleh perbedaan cara negara mendefinisikan kawasan itu. (He, 2018) menunjukkan bahwa Tiongkok tidak sekadar menolak konsep Indo-Pasifik, tetapi menyerap sebagian darinya ke dalam proyek geoekonominya, dan mengusulkan visi hibrida bagi institusionalisasi kawasan. (Singh, 2019) menempatkan Tiongkok dalam perdebatan yang dibaca dari India. Di sisi arsitektur keamanan, (Mokhtari, 2025) membandingkan QUAD, yang digambarkan mengandalkan kekuatan lunak seperti advokasi UNCLOS, kesadaran domain maritim, dan peningkatan kapasitas, dengan AUKUS, yang mengandalkan kekuatan keras seperti kapal selam bertenaga nuklir dan patroli bersama. Hubungan antarkonsep ini penting: cara sebuah kekuatan mendefinisikan kawasan menentukan institusi yang ia dukung, dan institusi itu pada gilirannya membuka atau menutup ruang bagi negara menengah seperti Indonesia.

Keamanan maritim dan kepentingan nasional Indonesia

Artikel ini memakai definisi operasional penulis: keamanan maritim adalah kemampuan negara menjaga kedaulatan, hak berdaulat, dan keselamatan pemanfaatan ruang laut dari ancaman tradisional maupun nonkonvensional melalui kombinasi diplomasi, hukum, pengawasan, dan daya tangkal. Dasar hukumnya adalah rezim negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, yang mengatur kedaulatan atas perairan kepulauan (Pasal 49) dan lintas alur laut kepulauan (Pasal 53) (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982). Di tingkat kebijakan, Perpres No. 16 Tahun 2017 memuat dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia dan rencana aksi 2016–2019. (Farhana, 2022) menguraikan lima pilar Poros Maritim Dunia, yaitu budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Konsep ini menghubungkan geopolitik dengan strategi: kepentingan nasional di laut dirumuskan melalui pilar-pilar tersebut, sedangkan lingkungan strategis menentukan seberapa jauh pilar itu dapat dijalankan.

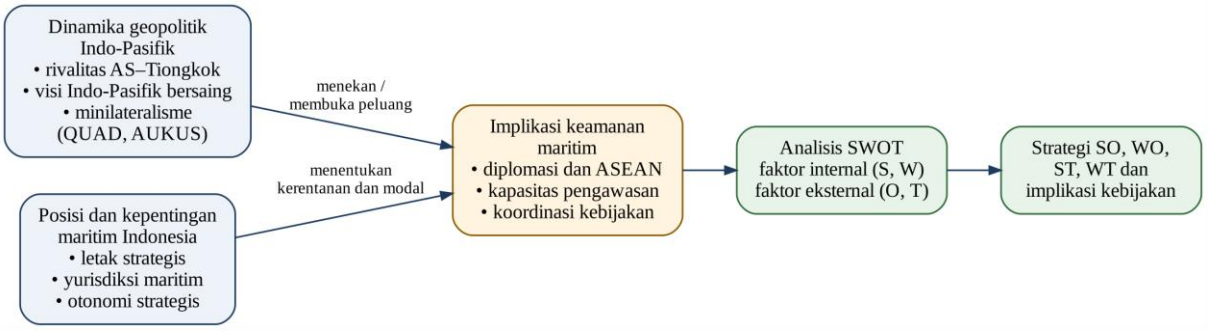
Hedging dan otonomi strategis

Hedging dibaca dalam literatur yang ditelaah sebagai cara negara menjaga fleksibilitas di antara kekuatan besar. (Yoshimatsu, 2022) menganalisis respons Indonesia terhadap Inisiatif Sabuk dan Jalan dan Indo-Pasifik sebagai strategi *hedging* negara pivot. (Koga & Lim, 2026) memakai *tactical hedging* dan sentralitas jaringan sebagai lensa, dan menunjukkan bahwa Indonesia memakai doktrin kebijakan luar negeri sebagai sinyal strategis untuk menguji reaksi,

menjaga fleksibilitas, dan membangun pengaruh. (Anwar, 2020) mengaitkan otonomi strategis dengan doktrin bebas-aktif: Indonesia ingin melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa dipaksa memilih. (B. A. Putra & Cangara, 2024) menambahkan lensa negara menengah dan kewirausahaan norma, yang merujuk pada siklus hidup norma Finnemore dan Sikkink serta konsep negara menengah Holbraad. Dalam artikel ini otonomi strategis diperlakukan sebagai tujuan kebijakan, sedangkan *hedging* dan pembangunan norma diperlakukan sebagai sarana untuk mencapainya.

Analisis SWOT sebagai alat sintesis strategis

Analisis SWOT memilah faktor menjadi kekuatan dan kelemahan (internal) serta peluang dan ancaman (eksternal), lalu menyilangkannya menjadi strategi SO, WO, ST, dan WT. Pemilahan internal dan eksternal ditentukan oleh siapa yang dapat mengendalikan faktor itu: faktor internal berada dalam kendali Indonesia, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan kawasan dan hanya dapat direspons. Dalam konteks strategi maritim, Putra et al. (2023) telah memakai analisis faktor internal dan eksternal yang dilanjutkan dengan QSPM dan AHP. Artikel ini memakai SWOT sebagai alat sintesis kualitatif, bukan alat pengukuran, sehingga tidak ada skor atau bobot numerik yang diberikan. Gambar 1 merangkum kerangka konseptual yang menghubungkan ketiga konsep di atas.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: sintesis penulis dari (He, 2018), (Anwar, 2020), dan (Koga & Lim, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif-kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis data sekunder. Tidak ada survei, wawancara, observasi, atau pengumpulan data primer. Sumber yang dipakai terdiri atas artikel jurnal, buku akademik dan bab buku, serta dokumen hukum dan kebijakan resmi. Titik awal penelusuran adalah 14 referensi hasil pencarian Scopus AI yang diberikan kepada penulis. Penelusuran dilengkapi dengan dua dokumen tambahan, yaitu artikel (Fitrah dkk., 2025) dan Deklarasi Pemimpin ASEAN 2024 tentang AOIP, dan metadata setiap sumber diperiksa pada halaman penerbit, repositori, serta ekspor basis data Scopus pada Oktober 2026. Sumber dipilih jika (a) membahas Indo-Pasifik, kebijakan luar negeri atau strategi maritim Indonesia, atau keamanan maritim kawasan, (b) terbit pada 2018–2026 (kecuali dokumen hukum), dan (c) metadatanya dapat dikonfirmasi. Sumber yang tidak dapat dikonfirmasi tidak dijadikan dasar klaim faktual.

Data diklasifikasikan ke dalam tiga tema, yaitu dinamika geopolitik kawasan, posisi dan kepentingan maritim Indonesia, serta respons strategis. Analisis isi tematik dipakai untuk menarik argumen, temuan, dan keterbatasan setiap sumber. Prosedur ini bukan tinjauan sistematis dan tidak mengikuti protokol PRISMA. Tabel 1 menunjukkan sumber yang dipakai, jenisnya, dan tingkat

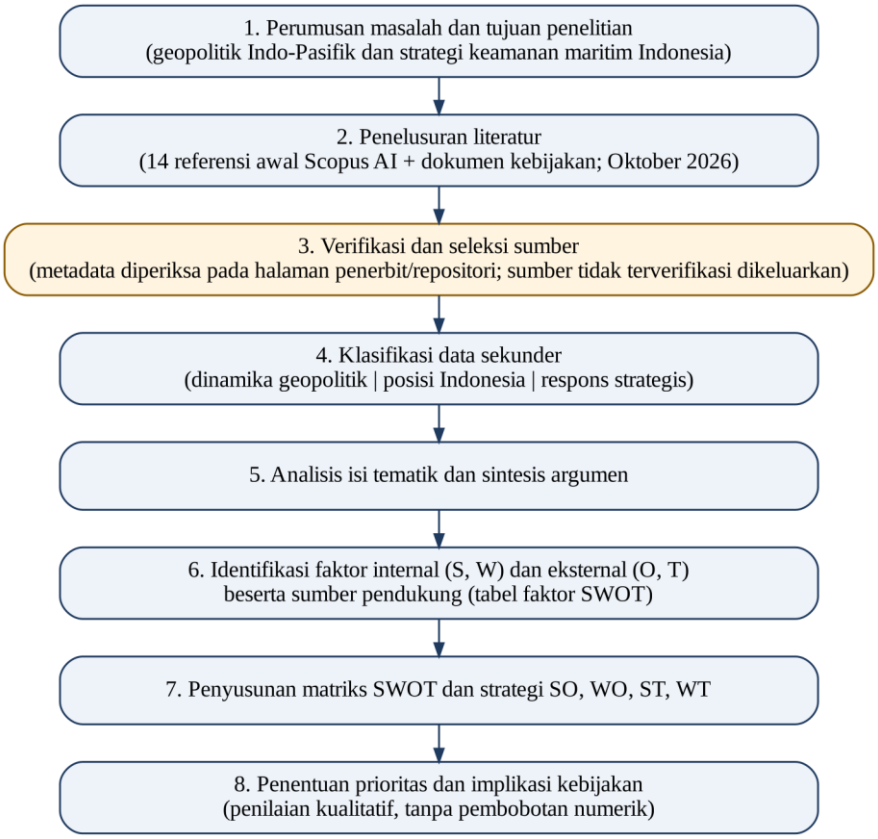
akses penulis terhadap isinya. Informasi tingkat akses dicantumkan agar pembaca dapat menilai seberapa jauh setiap klaim bersandar pada teks lengkap atau pada abstrak.

Tabel 1. Sumber Data Sekunder dan Tingkat Akses

No	Sumber	Jenis	Fokus	Tingkat akses
1	Anwar (2020)	Artikel jurnal	AOIP, motif Indonesia	Ringkasan isi
2	ASEAN (2024)	Dokumen resmi ASEAN	Deklarasi AOIP, sentralitas ASEAN	Teks lengkap
3	Darmawan et al. (2025)	Artikel jurnal	Kerja sama pertahanan RI–Australia	Ringkasan isi
4	Febrica (2023)	Buku	Strategi Indonesia di Indo-Pasifik	Deskripsi penerbit
5	Fitrah et al. (2025)	Artikel jurnal	Evolusi Poros Maritim Dunia 2014–2024	Teks lengkap (data kuantitatif tidak dipakai)
6	He (2018)	Artikel jurnal	Persepsi Tiongkok	Abstrak
7	Khanisa & Farhana (2022)	Buku (suntingan)	Poros Maritim Dunia, ASEAN	Deskripsi penerbit
8	Koga & Lim (2026)	Artikel jurnal	Sentralitas jaringan, hedging	Abstrak
9	Mokhtari (2025)	Bab buku	QUAD dan AUKUS	Abstrak
10	Putra et al. (2023)	Artikel jurnal	Strategi maritim, faktor internal-eksternal	Abstrak
11	Putra et al. (2024)	Artikel jurnal	Kewirausahaan norma, AOIP	Abstrak
12	Saputra et al. (2025)	Artikel jurnal	Daya tangkal, hukum maritim	Abstrak
13	Shekhar (2018)	Buku	Strategi besar Indonesia	Deskripsi penerbit
14	Scott (2019)	Artikel jurnal	Wacana strategis Indonesia	Metadata
15	Singh (2019)	Bab buku	Tiongkok dalam debat Indo-Pasifik	Metadata
16	Yoshimatsu (2022)	Artikel jurnal	Hedging dan BRI	Metadata
17	Perpres No. 16/2017	Dokumen kebijakan	Kebijakan Kelautan Indonesia	Halaman resmi (ringkas)
18	UNCLOS 1982	Dokumen hukum	Rezim negara kepulauan	Daftar isi resmi

Tingkat akses menunjukkan bagian sumber yang dibaca penulis: ringkasan isi, abstrak, deskripsi penerbit, atau metadata saja.

Analisis SWOT dilakukan dalam empat langkah: (1) faktor diidentifikasi dari temuan sumber dan dimasukkan ke tabel faktor beserta rujukannya; (2) faktor dipilah sebagai internal atau eksternal menurut kriteria kendali pada bagian Landasan Teori; (3) faktor disilangkan dalam matriks SWOT untuk menurunkan strategi SO, WO, ST, dan WT; dan (4) prioritas ditentukan melalui penilaian kualitatif yang dijelaskan alasannya. Setiap butir tabel dibedakan menurut asalnya: temuan penelitian terdahulu, sintesis penulis, atau rekomendasi kebijakan. Keterlacakan dijaga dengan mencantumkan sumber pada setiap faktor. Kredibilitas dijaga dengan tidak menambahkan angka, kutipan langsung, atau metadata yang tidak dapat dikonfirmasi. Untuk alasan itu, angka kuantitatif dalam (Fitrah dkk., 2025) tidak dipakai, karena rujukan datanya berupa laporan instansi yang tidak dapat dilacak dari daftar referensi artikel tersebut; hanya argumen kualitatifnya yang dipertimbangkan. Gambar 2 memperlihatkan alur penelitian yang benar-benar dijalankan.



Gambar 2. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Geopolitik Indo-Pasifik

Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurut (Anwar, 2020), rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok dan visi Indo-Pasifik yang saling bersaing mengancam menggeser ASEAN dari perannya sebagai penghimpun dialog kawasan. (He, 2018) menunjukkan bahwa sikap Tiongkok tidak statis: penolakan atas dimensi keamanan maritim Indo-Pasifik berjalan bersama penyerapan sebagian konsep itu ke dalam proyek geoekonomi. *Sintesis penulis:* karena sikap Beijing bergerak, Indonesia tidak dapat mengandalkan satu asumsi tentang konfigurasi kekuatan. Strategi maritimnya harus tetap berfungsi pada beberapa skenario.

Peran negara strategis lain. Jepang, Australia, dan India disebut (He, 2018) sebagai pihak yang mempromosikan konsep Indo-Pasifik, dan (Singh, 2019) membaca perdebatan itu dari India. (Febrica, 2023) menempatkan upaya Indonesia menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang sebagai inti diplomasi poros maritim. Dengan Australia, (Darmawan dkk., 2025) menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama pertahanan Agustus 2024 memperkuat interoperabilitas dan kerja sama maritim, tetapi menimbulkan tekanan terhadap nonblok.

Arsitektur keamanan regional. Literatur menggambarkan dua lapis. Lapis pertama berpusat pada ASEAN, dengan AOIP sebagai dokumen utama yang diperjuangkan Indonesia (Anwar, 2020; B. A. Putra & Cangara, 2024). Deklarasi Pemimpin ASEAN pada 9 Oktober 2024 menegaskan sentralitas ASEAN sebagai prinsip dasar kerja sama Indo-Pasifik, berkomitmen mengarusutamakan AOIP melalui proyek konkret, dan menyerukan mitra eksternal mendukung kerja sama yang substantif (ASEAN, 2024). Lapis kedua adalah kerja sama minilateral. (Mokhtari, 2025) menggambarkan QUAD dan AUKUS sebagai dua kerangka yang berbeda tetapi saling

melengkapi, yang satu menekankan norma dan kapasitas, yang lain penangkalan. *Sintesis penulis:* Indonesia berada di antara kedua lapis ini. Ia tidak menjadi anggota kerangka minilateral tersebut, tetapi lingkungan keamanannya dibentuk oleh keduanya, sehingga ruang geraknya bergantung pada kemampuan menjaga relevansi lapis ASEAN.

Implikasi bagi Asia Tenggara. (Anwar, 2020) mencatat keraguan atas kemampuan ASEAN menggerakkan proses Indo-Pasifik karena perpecahan internal, respons yang lemah di Laut Cina Selatan, dan pengambilan keputusan yang lambat. (Saputra dkk., 2025) menambahkan bahwa diplomasi berbasis konsensus membatasi kemampuan merespons provokasi maritim. Implikasinya, jaminan keamanan kolektif yang kuat tidak dapat diasumsikan, sehingga beban membangun kapasitas dan daya tangkal sebagian besar jatuh pada masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Posisi Geostrategis dan Kepentingan Maritim Indonesia

Letak strategis dan jalur pelayaran. (Anwar, 2020) menggarisbawahi posisi Indonesia di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan (Saputra dkk., 2025) menyebut Selat Malaka sebagai titik pusat stabilitas kawasan. Letak ini memberi Indonesia nilai tawar, tetapi sekaligus kerentanan karena Indonesia terpapar berbagai ancaman maritim yang terkait dengan lokasinya (I. N. Putra dkk., 2023). Artikel ini tidak menyajikan angka lalu lintas pelayaran atau luas wilayah karena data tersebut tidak diverifikasi dalam penelusuran ini.

Kepentingan nasional dan yurisdiksi maritim. Status negara kepulauan memberi dasar hukum atas perairan kepulauan dan lintas alur laut kepulauan (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982). (Saputra dkk., 2025) menilai hukum maritim dapat diperlakukan sebagai alat strategis, dan menyarankan agar visi Poros Maritim Dunia berkembang menjadi doktrin pertahanan maritim yang koheren. Kepentingan ini diwadahi dalam Kebijakan Kelautan Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 16, 2017) dan lima pilar Poros Maritim Dunia (Farhana, 2022).

Peran Indonesia di kawasan. (B. A. Putra & Cangara, 2024) memandang Indonesia sebagai pengusung norma yang membawa AOIP hingga terinstitusionalisasi. (Shekhar, 2018) menempatkan perilaku Indonesia dalam kerangka ambisi menjadi kekuatan Indo-Pasifik, dengan penekanan pada faktor domestik sebagai pendorong dan pembatas. (Koga & Lim, 2026) mencatat pergeseran dari upaya mencari peran sentral secara mandiri ke penguatan sentralitas ASEAN. (Fitrah dkk., 2025) sejalan dengan itu secara kualitatif: pengaruh Indonesia dibatasi oleh rivalitas kekuatan besar dan keterbatasan internal. *Sintesis penulis:* peran Indonesia lebih kuat sebagai pembentuk norma dan konvener daripada sebagai pemilik kapasitas daya paksa, dan perbedaan ini menjelaskan banyak pilihan strateginya.

Implikasi Geopolitik terhadap Strategi Keamanan Maritim Indonesia

Diplomasi dan kerja sama regional. AOIP menjadi sarana utama Indonesia menanamkan preferensinya dalam kerangka ASEAN (Koga & Lim, 2026). (Anwar, 2020) menyebut perlunya rencana aksi konkret agar prinsip-prinsip AOIP menjadi kebijakan. Penilaian itu bertarikh 2019–2020. Deklarasi 2024 kemudian menyebut sejumlah langkah operasional, yaitu forum untuk melaksanakan AOIP, gugus tugas koordinasi ekonomi biru, dan penerbitan *ASEAN Maritime Outlook*, serta menegaskan kerja sama maritim sesuai UNCLOS (ASEAN, 2024). Pertanyaan yang tersisa bergeser dari ketiadaan rencana aksi ke efektivitas pelaksanaan dan dukungan mitra, yang menurut (Koga & Lim, 2026) masih tidak merata. Artikel ini tidak menilai hasil langkah-langkah tersebut. Di luar ASEAN, Anwar mencatat bahwa investasi infrastruktur dari Tiongkok, Jepang, dan India serta ancaman nontradisional seperti terorisme membuat kerja sama kawasan yang luas bermanfaat, sedangkan (Yoshimatsu, 2022) membaca keterlibatan Indonesia dengan Inisiatif

Sabuk dan Jalan sebagai bagian dari strategi *hedging*.

Kapasitas pertahanan dan pengawasan maritim. (Saputra dkk., 2025) menyimpulkan bahwa kapabilitas angkatan laut, diplomasi maritim berbasis hukum, dan kerangka hukum-strategis yang terpadu merupakan kunci penangkalan berlapis, dengan modernisasi yang lambat sebagai hambatan. (Darmawan dkk., 2025) menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan dapat mendukung industri pertahanan dan interoperabilitas. (Mokhtari, 2025) menyebut kesadaran domain maritim dan peningkatan kapasitas sebagai bagian dari kerja sama QUAD. *Sintesis penulis:* kapasitas dapat dibangun lebih cepat melalui kemitraan, tetapi jenis kemitraan yang dipilih memengaruhi persepsi nonblok.

Tantangan koordinasi dan implementasi. (Saputra dkk., 2025) menemukan komunikasi strategis yang tidak konsisten dan eksekusi yang tidak merata, dan (Koga & Lim, 2026) menyebut kendala domestik serta celah implementasi. Bukti langsung tentang pembagian kewenangan antarlembaga maritim tidak terdapat dalam sumber yang ditelaah, sehingga artikel ini tidak membuat klaim rinci tentang koordinasi kelembagaan. Hal ini menjadi keterbatasan dan bahan penelitian lanjutan.

Pilihan strategis dan otonomi kebijakan. (Anwar, 2020) menggambarkan otonomi strategis sebagai upaya terlibat dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa memilih salah satu. (Darmawan dkk., 2025) menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan yang mendalam menguji prinsip tersebut. (Koga & Lim, 2026) memperingatkan bahwa keterlibatan di luar ASEAN di bawah pemerintahan Prabowo berisiko mengencerkan sentralitas ASEAN. Pilihan Indonesia karenanya bukan antara bersekutu atau tidak, tetapi seberapa luas dan seberapa terstruktur keterlibatannya.

Analisis SWOT

Tabel 2 memuat faktor internal dan Tabel 3 faktor eksternal. Kolom ketiga berisi dasar bukti yang diparafrasakan dari sumber, dan kolom keempat sumbernya. Faktor diberi kode agar dapat dirujuk pada matriks. Tidak ada skor atau bobot yang diberikan, karena penelitian ini tidak memiliki data dan metode penilaian yang memadai untuk itu.

Tabel 2. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Kode	Faktor	Dasar bukti (parafrasa)	Sumber
S1	Letak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik	Posisi Indonesia memberi bobot dalam diskusi Indo-Pasifik dan menjadikan pengaruh maritimnya penting bagi stabilitas, terutama di Selat Malaka.	(Anwar, 2020; Saputra dkk., 2025)
S2	Visi dan kerangka kebijakan maritim	Poros Maritim Dunia dengan lima pilar dan Kebijakan Kelautan Indonesia beserta rencana aksinya.	(Farhana, 2022; Febrica, 2023; Peraturan Presiden Nomor 16, 2017)
S3	Modal diplomatik dan kewirausahaan norma	Indonesia mengusung AOIP yang diadopsi ASEAN; norma dinilai terinstitusionalisasi dan diinternalisasi.	(Anwar, 2020; B. A. Putra & Cangara, 2024)
S4	Otonomi strategis (bebas-aktif) dan hedging	Indonesia dapat terlibat dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa memilih; respons terhadap BRI dibaca sebagai hedging.	(Anwar, 2020; Koga & Lim, 2026; Yoshimatsu, 2022)
S5	Status negara kepulauan dan hukum maritim	Rezim UNCLOS atas perairan kepulauan; hukum maritim dapat menjadi alat strategis; UNCLOS dikukuhkan sebagai acuan kerja sama maritim ASEAN.	(ASEAN, 2024; Saputra dkk., 2025; United Nations, 1982)

Kode	Faktor	Dasar bukti (parafrasa)	Sumber
W1	Modernisasi pertahanan lambat dan anggaran terbatas	Hambatan bagi kredibilitas daya tangkal.	(Saputra dkk., 2025)
W2	Komunikasi strategis tidak konsisten dan eksekusi tidak merata	Kebijakan tidak dilaksanakan secara seragam.	(Saputra dkk., 2025)
W3	Visi maritim belum menghasilkan sentralitas jaringan yang bertahan	Indonesia beralih ke penguatan sentralitas ASEAN karena kendala domestik dan rivalitas; efektivitas visi dibatasi rivalitas dan keterbatasan internal.	(Fitrah dkk., 2025; Koga & Lim, 2026)
W4	Kebijakan dipengaruhi politik domestik dan pergantian prioritas	Faktor domestik mendorong dan membatasi perilaku internasional; arah dapat bergeser antar pemerintahan; keberlanjutan bergantung pada pelembagaan.	(Febrica, 2023; Fitrah dkk., 2025; Koga & Lim, 2026; Shekhar, 2018)

S = kekuatan, W = kelemahan. Tanpa bobot atau skor.

Tabel 3. Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)

Kode	Faktor	Dasar bukti (parafrasa)	Sumber
O1	AOIP sebagai wadah penanaman preferensi Indonesia	AOIP membantu Indonesia menanamkan preferensinya dalam ASEAN, dan kini diarusutamakan melalui forum dan proyek konkret.	(Anwar, 2020; ASEAN, 2024; Koga & Lim, 2026)
O2	Kerja sama pertahanan bilateral yang menguat	Perjanjian RI–Australia (Agustus 2024) memperdalam interoperabilitas dan kerja sama maritim.	(Darmawan dkk., 2025)
O3	Investasi infrastruktur dan kerja sama dari banyak mitra	Tiongkok, Jepang, dan India menanamkan investasi infrastruktur yang dapat dimanfaatkan.	(Anwar, 2020; Yoshimatsu, 2022)
O4	Agenda kapasitas dan kesadaran domain maritim	QUAD menekankan UNCLOS, kesadaran domain maritim, dan peningkatan kapasitas.	(Mokhtari, 2025)
O5	Ruang bagi kelembagaan Indo-Pasifik yang inklusif (tafsir penulis)	Visi hibrida Tiongkok membuka kemungkinan institusionalisasi kawasan yang inklusif.	(He, 2018); sintesis penulis
T1	Rivalitas AS–Tiongkok dan visi Indo-Pasifik yang bersaing	Berisiko meminggirkan ASEAN sebagai penghimpun dialog.	(Anwar, 2020; He, 2018; Singh, 2019)
T2	Kohesi ASEAN terbatas dan keputusan berbasis konsensus	Perpecahan internal, respons lemah di Laut Cina Selatan, keputusan lambat; dukungan mitra eksternal untuk proyek AOIP masih diserukan dan tidak merata.	(Anwar, 2020; ASEAN, 2024; Koga & Lim, 2026; Saputra dkk., 2025)
T3	Dilema nonblok akibat AUKUS dan hubungan dengan Tiongkok	Kerja sama pertahanan menguji penjagaan nonblok.	(Darmawan dkk., 2025; Mokhtari, 2025)
T4	Sentralitas ASEAN baru sebagian terinstitusionalisasi	Risiko pengenceran oleh keterlibatan di luar ASEAN dan dukungan eksternal yang tidak merata.	(Koga & Lim, 2026)
T5	Ancaman maritim tradisional dan nontradisional	Ancaman terkait lokasi serta ancaman nontradisional seperti terorisme.	(Anwar, 2020; I. N. Putra dkk., 2023)

O = peluang, T = ancaman. Tanpa bobot atau skor.

Pemilahan memerlukan kehati-hatian. Hubungan Indonesia dengan AOIP dibagi dua: kemampuan Indonesia mengusung dan menanamkan gagasan dipandang sebagai kekuatan (S3), sedangkan keterbatasan kohesi ASEAN dan dukungan mitra dipandang sebagai ancaman (T2)

karena berada di luar kendali Indonesia. Demikian pula, risiko pengenceran sentralitas ASEAN (T4) dimasukkan sebagai faktor eksternal karena menyangkut penerimaan dan dukungan mitra kawasan, walaupun sebagian bersumber dari pilihan Indonesia sendiri. Butir O5 merupakan tafsir penulis atas sumber dan ditandai pada tabel sebagai sintesis.

Formulasi Strategi

Tabel 4 menyilangkan faktor pada Tabel 2 dan 3 menjadi delapan strategi. Setiap strategi di bawah ini dijelaskan alasannya. Seluruh strategi merupakan sintesis dan rekomendasi penulis, bukan temuan sumber.

Tabel 4. Matriks SWOT dan Strategi SO, WO, ST, WT

Faktor internal \ faktor eksternal	**PELUANG (O)** O1: AOIP sebagai wadah penanaman preferensi Indonesia O2: Kerja sama pertahanan bilateral yang menguat O3: Investasi infrastruktur dan kerja sama dari banyak mitra O4: Agenda kapasitas dan kesadaran domain maritim O5: Ruang bagi kelembagaan Indo-Pasifik yang inklusif (tafsir penulis)	**ANCAMAN (T)** T1: Rivalitas AS–Tiongkok dan visi Indo-Pasifik yang bersaing T2: Kohesi ASEAN terbatas dan keputusan berbasis konsensus T3: Dilema nonblok akibat AUKUS dan hubungan dengan Tiongkok T4: Sentralitas ASEAN baru sebagian terinstitusionalisasi T5: Ancaman maritim tradisional dan nontradisional
KEKUATAN (S) S1: Letak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik S2: Visi dan kerangka kebijakan maritim S3: Modal diplomatik dan kewirausahaan norma S4: Otonomi strategis (bebas-aktif) dan hedging S5: Status negara kepulauan dan hukum maritim	**Strategi SO (kekuatan memanfaatkan peluang)** **SO1 (S1, S3, S5, O1, O4):** Menjadikan AOIP dan posisi geografis landasan diplomasi maritim berbasis hukum, dengan proyek kerja sama konkret terbuka bagi mitra di bawah payung ASEAN. **SO2 (S2, S4, O2, O3):** Memperluas kerja sama pertahanan dan infrastruktur maritim dengan banyak mitra secara paralel tanpa aliansi formal.	**Strategi ST (kekuatan menghadapi ancaman)** **ST1 (S3, S4, S5, T1, T2):** Diplomasi norma dan hukum laut untuk mendorong pelaksanaan proyek AOIP dan menjaga sentralitas ASEAN. **ST2 (S4, T3):** Hedging terkelola disertai komunikasi strategis transparan untuk meredam dilema nonblok.
KELEMAHAN (W) W1: Modernisasi pertahanan lambat dan anggaran terbatas W2: Komunikasi strategis tidak konsisten dan eksekusi tidak merata W3: Visi maritim belum menghasilkan sentralitas jaringan yang bertahan W4: Kebijakan dipengaruhi politik domestik dan pergantian prioritas	**Strategi WO (mengatasi kelemahan dengan peluang)** **WO1 (W1, W2, O2, O4):** Memanfaatkan kerja sama pertahanan dan program kapasitas untuk memodernisasi pengawasan secara bertahap, mulai dari titik rawan. **WO2 (W3, W4, O1):** Mengoperasionalkan AOIP dan visi maritim melalui rencana aksi berindikator yang dilembagakan lintas pemerintahan.	**Strategi WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)** **WT1 (W1, W2, T5):** Memprioritaskan penangkalan minimum yang kredibel dan pengawasan pada wilayah paling rawan. **WT2 (W3, W4, T1, T4):** Menyaring keterlibatan di luar ASEAN dengan kriteria kepentingan nasional dan menghindari komitmen melebihi kapasitas.

Sumber: sintesis penulis dari Tabel 2 dan Tabel 3. Kode dalam kurung menunjukkan faktor yang disilangkan.

Strategi SO. SO1 memanfaatkan letak strategis (S1), modal diplomatik AOIP (S3), dan basis hukum kepulauan (S5) untuk membuka peluang AOIP (O1) dan agenda kapasitas maritim (O4). Alasannya, (Anwar, 2020; Koga & Lim, 2026) menunjukkan bahwa AOIP adalah wadah tempat preferensi Indonesia sudah tertanam, dan (Mokhtari, 2025) menunjukkan bahwa kesadaran domain maritim dan peningkatan kapasitas merupakan bahasa kerja sama yang dapat diterima banyak pihak. Implikasinya, Indonesia dapat mengusulkan proyek konkret terbuka bagi mitra di bawah payung ASEAN. SO2 memanfaatkan visi maritim (S2) dan otonomi strategis (S4) untuk memperluas kerja sama pertahanan dan infrastruktur (O2, O3) dengan banyak mitra secara paralel tanpa aliansi formal. Implikasinya, bobot satu mitra tidak boleh mendominasi, agar otonomi tetap terjaga.

Strategi WO. WO1 memanfaatkan kerja sama pertahanan dan program kapasitas (O2, O4) untuk mengurangi hambatan modernisasi dan anggaran (W1) serta kelemahan eksekusi (W2) secara bertahap, dimulai dari titik rawan seperti Selat Malaka (Saputra dkk., 2025). (Darmawan dkk., 2025) memberi dasar bahwa kerja sama pertahanan dapat mendukung industri pertahanan nasional. WO2 memanfaatkan momentum AOIP (O1) untuk mengatasi kegagalan visi maritim menghasilkan sentralitas yang bertahan (W3) dan ketergantungan pada politik domestik (W4), dengan menautkan proyek dan forum AOIP yang kini tersedia (ASEAN, 2024) pada rencana aksi berindikator yang dilembagakan lintas pergantian pemerintahan, misalnya melalui Kebijakan Kelautan Indonesia. (Fitrah dkk., 2025) menyebut pelembagaan sebagai ujian utama keberlanjutan

visi maritim. Implikasinya adalah kebutuhan komitmen politik dan anggaran berkelanjutan.

Strategi ST. ST1 menggunakan modal diplomatik (S3), basis hukum (S5), dan otonomi strategis (S4) untuk menghadapi rivalitas kekuatan besar (T1) dan kohesi ASEAN yang terbatas (T2) melalui diplomasi norma dan hukum laut, termasuk mendorong pelaksanaan proyek AOIP. Hukum laut dipilih karena Deklarasi ASEAN 2024 sendiri menempatkan UNCLOS sebagai acuan kerja sama maritim (ASEAN, 2024), sehingga ia dapat berfungsi sebagai bahasa bersama, dan karena konsisten dengan penilaian (Saputra dkk., 2025) tentang hukum maritim sebagai alat strategis. ST2 memanfaatkan *hedging* terkelola (S4) untuk meredam dilema nonblok (T3), dengan komunikasi strategis yang transparan agar kemitraan dengan satu pihak tidak dibaca sebagai keberpihakan, sebagaimana tekanan yang diidentifikasi (Darmawan dkk., 2025).

Strategi WT. WT1 menjawab kelemahan kapasitas (W1, W2) di hadapan ancaman maritim (T5) dengan memprioritaskan penangkalan minimum yang kredibel dan pengawasan pada wilayah paling rawan sesuai kemampuan anggaran. WT2 menjawab kelemahan konsistensi (W3, W4) di hadapan ancaman terhadap sentralitas ASEAN (T1, T4) dengan menyaring keterlibatan di luar ASEAN menggunakan kriteria kepentingan nasional yang jelas dan menghindari komitmen yang melebihi kapasitas pelaksanaan. Keduanya bersifat defensif dan berfungsi sebagai pengaman bagi strategi lain.

Implikasi Kebijakan bagi Indonesia

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penulis menilai bahwa prioritas pertama adalah WO2 dan ST1, yaitu pelembagaan AOIP dan visi maritim melalui rencana aksi berindikator serta diplomasi hukum laut. Alasannya, kelemahan dan ancaman yang paling sering muncul dalam sumber terbaru berkaitan dengan implementasi, pelembagaan, dan kohesi, bukan ketiadaan gagasan atau wadah (Anwar, 2020; ASEAN, 2024; Fitrah dkk., 2025; Koga & Lim, 2026; Saputra dkk., 2025). Prioritas kedua adalah WO1, yakni pembangunan kapasitas pengawasan secara bertahap melalui kemitraan beragam. Strategi SO berfungsi sebagai pengungkit setelah dua prioritas itu berjalan, dan strategi WT sebagai pengaman risiko.

Hasil ini berbeda dari (I. N. Putra dkk., 2023), yang menempatkan strategi maritim nasional pada Kuadran I dengan strategi SO sebagai jalur utama. Perbedaan dapat bersumber dari metode (penilaian berbobot dan berskor dibandingkan sintesis kualitatif), dari periode sumber, atau dari penekanan literatur terbaru pada kendala pelaksanaan. Penelitian ini tidak dapat menentukan penilaian mana yang lebih tepat, dan hanya menunjukkan bahwa kesimpulan prioritas peka terhadap pilihan metode dan sumber. Batasan penerapan strategi: ketiganya bergantung pada anggaran, komitmen politik lintas pemerintahan, dan respons mitra, yang tidak dapat dinilai dari data sekunder yang dipakai.

KESIMPULAN

Pertama, dinamika geopolitik Indo-Pasifik ditandai oleh rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok, visi kawasan yang bersaing, dan lapisan kerja sama minilateral di samping arsitektur berpusat ASEAN. Bagi Asia Tenggara, implikasinya adalah risiko peminggiran ASEAN dan terbatasnya jaminan keamanan kolektif. Kedua, ruang gerak strategi keamanan maritim Indonesia dibentuk oleh kekuatan berupa letak strategis, modal diplomatik AOIP, prinsip bebas-aktif, visi dan kerangka kebijakan maritim, serta basis hukum kepulauan, dan oleh kelemahan berupa lambatnya modernisasi dan keterbatasan anggaran, komunikasi dan eksekusi yang tidak konsisten, sentralitas yang belum bertahan, serta ketergantungan pada politik domestik. Ketiga, berdasarkan matriks SWOT, strategi yang paling beralasan adalah pelembagaan AOIP dan visi maritim melalui rencana

aksi konkret, diplomasi hukum laut, dan pembangunan kapasitas pengawasan secara bertahap melalui kemitraan beragam, dengan penjagaan otonomi strategis.

Kontribusi artikel bersifat sintesis: tabel faktor SWOT yang setiap butirnya ditautkan ke sumber, matriks SWOT, dan penjelasan bahwa prioritas strategi bergantung pada metode dan periode sumber. Rekomendasinya adalah (a) menyusun rencana aksi AOIP dan Kebijakan Kelautan yang memiliki indikator dan lintas periode pemerintahan, (b) memprioritaskan pengawasan di titik rawan sesuai kemampuan anggaran, dan (c) menjaga keseimbangan kemitraan disertai komunikasi strategis yang konsisten.

Keterbatasan penelitian meliputi penggunaan data sekunder semata, dan akses yang tidak sama terhadap sumber: sebagian sumber hanya dapat dibaca pada tingkat abstrak, ringkasan, atau deskripsi penerbit (lihat Tabel 1), sehingga tafsir atas sumber tersebut dapat berbeda dari teks lengkapnya. Sumber yang hanya berupa metadata dipakai sebatas untuk menunjukkan adanya perdebatan. Bukti tentang koordinasi antarlembaga maritim terbatas, dan faktor tidak diberi bobot. Saran penelitian lanjutan ialah memverifikasi seluruh faktor pada teks lengkap, memperkaya korpus dengan dokumen kebijakan dan sumber berbahasa Indonesia, serta menguji tabel faktor dan strategi melalui wawancara pakar atau diskusi kelompok terarah, serta memberi bobot dengan metode yang transparan.

DAFTAR REFERENSI

Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, *96*(1), 111–129. https://doi.org/10.1093/ia/iiz223

ASEAN. (2024). *ASEAN LEADERS' DECLARATION ON THE ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC FOR THE FUTURE-READY ASEAN AND ASEAN-CENTRED REGIONAL ARCHITECTURE*.

Darmawan, W., Sumadinata, R. W. S., & Darmawan, W. B. (2025). Political dynamics of Indonesia-Australia defence cooperation: Navigating geopolitical challenges in the Indo-Pacific. *Research Journal in Advanced Humanities*, *6*(3). https://doi.org/10.58256/m019k676

Farhana, F. (2022). ASEAN Maritime Security: The Global Maritime Fulcrum in the Indo-Pacific. In *ASEAN Maritime Security: The Global Maritime Fulcrum in the Indo-Pacific*. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2362-3

Febrica, S. (2023). Indonesia and the Indo-Pacific. In *Indonesia and the Indo-Pacific*. https://doi.org/10.4324/9781003395317

Fitrah, E., Darmawan, A. B., & Luthfi, R. M. (2025). Indonesia's Global Maritime Fulcrum Strategy: Navigating Great Power Competition and Regional Leadership in Indo-Pacific Security (2014-2024). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, *14*(1), 74. https://doi.org/10.25077/ajis.14.1.74-90.2025

He, B. (2018). Chinese Expanded Perceptions of the Region and Its Changing Attitudes Toward the Indo-Pacific: a Hybrid Vision of the Institutionalization of the Indo-Pacific. *East Asia*, *35*(2), 117–132. https://doi.org/10.1007/s12140-018-9291-8

Koga, K., & Lim, K. H. C. (2026). Indonesia's Search for Network Centrality in the Indo-Pacific. *Global Policy*. https://doi.org/10.1111/1758-5899.70210

Mokhtari, J. (2025). QUAD and AUKUS: A Smart Power Approach to Indo- Pacific Maritime Security. In *Emerging Maritime Security Strategies of Global Powers* (pp. 105–130). https://doi.org/10.4018/979-8-3373-4470-6.ch005

Peraturan Presiden Nomor 16. (2017). *REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN*

REPUBLIK INDONESIA.

Putra, B. A., & Cangara, A. R. (2024). Middle Power Norm Entrepreneur: Indonesia's Advocacy of the ASEAN Indo-Pacific Outlook. *SAGE Open*, *14*(4). https://doi.org/10.1177/21582440241302149

Putra, I. N., Sudiarso, A., Khaerudin, K., & Susilo, A. K. (2023). Combine of Blue Ocean Strategy-System Dynamics for National Maritime Strategy in Indo-Pacific Region. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, *11*(2), 595–617. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85163130450&partnerID=40&md5=d81cb9a7b5bb44513ca1c7b0b767757d

Saputra, R. M., Somantri, G. R., & Subroto, A. (2025). Deterrence Effect in The Making: The Strategic Role of Indonesia's Maritime Law in ASEAN. *International Law Discourse in Southeast Asia*, *4*(2), 113–150. https://doi.org/10.15294/ildisea.v4i2.25028

Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *38*(2), 194–217. https://doi.org/10.1177/1868103419860669

Shekhar, V. (2018). Indonesia's foreign policy and grand strategy in the 21st century: Rise of an Indo-Pacific power. In *Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power*. https://doi.org/10.4324/9781315560977

Singh, S. (2019). Locating China in the Indo-Pacific Debates: Perspectives from India. In *Research Series on the Chinese Dream and China's Development Path: Part F11233* (pp. 83–98). https://doi.org/10.1007/978-981-13-7693-1_4

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

Yoshimatsu, H. (2022). Indonesia's response to the Belt and Road Initiative and the Indo-Pacific: A pivotal state's hedging strategy. *Asian Politics and Policy*, *14*(2), 159–174. https://doi.org/10.1111/aspp.12629